

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Angger Sigit Pramukti, dan Meylani Chahyaningsih, 2018, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo
- Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Dyah ochtorina susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Reserch)*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta
- Fauziah, dkk, 2020, *Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi mandatory UU Nomor 33 tahun 2014*, Litbangdiklat Press, Jakarta
- Jimly assiddiqie, 2005, *konstitusi dan konstitusionalisme indonesia*, konstitusi press, Jakarta
- Jimly Asssidiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuanan Ilmu Populer, Jakarta
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Peter Mamud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, PT kharisma putra utama, Jakarta
- Rozali Abdullah, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, , PT. Raja Grasindo, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Hukum Perijinan*, Surabaya, Ubhara Press Team.
- Yusnani hasimzoem, M. Iwan Satriawan, DKK, 2018, *hukum pemerintahan daerah*, cetakan kesatu, cetakan kedua, rajawali pers, Depok
- Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan kesatu, marpoyan tujuh, Pekanbaru.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Negara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika.

Jurnal :

Eni Rahmawati dan Eka Wati, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Tv Kabel Mendirikan Usaha Pada Sarana Fasilitas Umum Di Kota Samarinda*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Gedion Arif Setyawan, 2010, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kriminologi Di Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, Tesis, FH Univesitas Sumatera Utara Medan

Rusadi Kantaprawira, 1998, *"Hukum dan Kekuasaan"*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta

Silviana, Anita, 2018, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Internet Dan Televisi Kabel) Serta Peranan*

*Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Pemenuhan Hak Pelanggan
Dihubungkan Dengan UU no. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen (Study Kasus di PT. MNC PLAY Semarang). Undergraduate
thesis, Fakultas Hukum UNISSULA*

Silviana,2018, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Penyiaran
Berlangganan(Internet Dan Televisi Kabel) Serta Membahas Mengenai
ApakahPeran Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyiaran
Berlangganan SebagaiPengawasTerkait Pemenuhan Hak pelanggan
yang diubungkan dengan UU no 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan
konsumen, laporan penelitian, FH UNISILA*

Sufriadi ,2014, *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Jurnal Yuridis Vol. I
No. 1 yogyakarta*

Telly Sumbu,2010, *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah,
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado*

Situs internet

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengawasan-adalah/> Diakses pada 15 januari 2022